

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TALIKURAN BARAT KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA

*Merry Onibala¹
Marlien Lopian²
Ventje Kasenda³*

Abstrak

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah, karena peran masyarakat sangat penting dimana masyarakat yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut, maka di dalam setiap suatu pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada tahap evaluasinya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap implementasi pembangunan infrastruktur, masyarakat terkadang berpartisipasi hanya karena ada pendapatan atau upah yang didapat, hal ini terlihat wajar namun juga sekaligus memprihatinkan, disisi lain pemerintah dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tingkat pengawasan atau evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah, masih banyak masyarakat yang bermasa bodoh atau tidak ingin mengetahui laporan dari pemerintah, mereka hanya tahu adalah hasil dari pembangunan itu sendiri.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pembangunan desa/kelurahan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang di laksanakan secara serasi dan terpadu, secara berdaya guna dan berhasil guna di setiap dan di seluruh kawasan desa/kelurahan. Pembangunan desa harus benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi desa/kelurahan dan bertumpuh pada strategi dasar tipologi pembangunan serta di tujukan pada peningkatan ketahanan nasional dan pemantapan wawasan nusantara. Belum adanya petunjuk teknis untuk Kelurahan turunan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Pemerintah Kelurahan masih berpatokan pada Peraturan pemerintah yang lama, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan Kelurahan adalah wilayah kerja Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan, kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang diangkat oleh Bupati atas usul camat serta bertanggungjawab kepada bupati melalui camat. Dalam tugas dan fungsinya pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh bupati. Dalam menjalankan tugas tersebut lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yakni sekretaris kelurahan, seksi-seksi dan dapat dibentuk lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Mengingat sumber dana kelurahan hanya bersumber dari APBD serta bantuan dari Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga, maka Pemerintah Kelurahan

diberikan pekerjaan rumah yang cukup berat untuk menjalankan tugasnya terutama pembangunan, dibutuhkan kemampuan yang baik dari pemerintah kelurahan untuk menggarakkan partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, agar tidak perlu menunggu dana dan proyek dari pemerintah Kabupaten atau Provinsi untuk membangun.

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah. Karena peran masyarakat sangat penting dimana masyarakat yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut. Maka di dalam setiap suatu pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, karena proses perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal yang sangat penting dimana tahap perencanaan sebagai tahap penentuan keputusan yang akan diambil. Kesalahan dalam perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dalam mengambil keputusan. Maka dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan,

pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan infrastruktur yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan membangun dengan semangat lokalitas.

Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal Korten (2008:87). Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya. Kabupaten Minahasa dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itulah, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa maupun kelurahan. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan. Bila demikian adanya,

maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya (partisipatif). Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif. Hal tersebut di atas kemudian memunculkan pertanyaan di Kecamatan Kawangkoan Utara, khususnya di Kelurahan Talikuran Barat bahwa apakah partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah terlaksana dengan baik, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan.

Melalui penelitian awal, ditemukan bahwa di Kelurahan Talikuran Barat, telah ada beberapa program pembangunan seperti perbaikan jalan ke kebun, pembelian tanah untuk pembangunan Kantor Kelurahan, perencanaan pembuatan kantor kelurahan, pembangunan drainase serta pembangunan gudang penyimpanan setiap lingkungan. Fasilitas di kelurahan Talikuran Barat belum maksimal diakibatkan belum optimalnya pemekaran kelurahan yang terjadi pada tahun 2010 lalu, ketidaksiapan tersebut berdampak pada infrastruktur yang belum dibangun oleh pemerintah. Dampak dari kemandekan pembangunan tersebut, pemerintah dan LPM berinisiatif untuk menggalang swadaya masyarakat agar berpartisipasi dalam program-program pembangunan tersebut, namun sejauh ini terlihat partisipasi masyarakat belum terlihat maksimal.

Tinjauan Pustaka

Partisipasi pada hakekatnya menyangkut setiap mental dan

emosional atau perilaku seseorang sebagai warga negara dan warga masyarakat, namun demikian sikap dan perilaku yang bagaimana dapat kita artikan secara sesungguhnya. Partisipasi mempunyai lingkup dan tingkatannya sendiri-sendiri. Itu tergantung dari sudut mana kita memandangnya dan harapan-harapan yang ada mengenai perilaku yang dikehendaki. Partisipasi dapat bersifat semu bila perilaku yang diperlihatkan bersifat sangat sementara dan sangat jauh dari yang diharapkan atau tidak disertai dengan kesediaan psikologis yang sesungguhnya, sebaliknya partisipasi dapat bersifat persial bila perilaku yang ditampilkannya hanya sebagian saja dari yang sesungguhnya diharapkan akan tetapi dapat juga menjadi lengkap bila sesuai atau mendekati yang diharapkan. Hal mengambil bagian wujud peristiwa psikologis bagi seseorang karena sebagai semangat jiwa yang dilakukan secara sadar untuk turut secara aktif dalam melibatkan diri memberikan sumbangsi-sumbangsi baik moril maupun materil. Untuk memperoleh pengertian partisipasi penulis telah menimbang beberapa pendapat sarjana melalui definisinya, seperti menurut Winardi (2009:64) mengemukakan bahwa secara formal partisipasi adalah “turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan fungsi-fungsi dalam proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan hal itu”. Dengan demikian seseorang secara individu kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut, maka ia akan merasa dirinya dihargai serta diperlukan dalam segala hal, terutama dalam proses pembuatan

keputusan, penentuan dan pembuatan suatu rencana pembangunan, sehingga hal ini pula akan menjadi motivasi bagi seseorang untuk melibatkan diri dalam mengambil bagian dari kegiatan pembangunan.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syarakayng* berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009:115-118). Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006:22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, 19 dari wewenang dan kelima sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat,

menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006:22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006:22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Todaro (2010:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2010:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono, 2010:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta

kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Sondang P. Siagian, (2008:21) mendefinisikan pembangunan adalah: "Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa." Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Batten (dalam Ndraha 2008:110) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya. Proses ini dapat diringkas dengan nama partisipasi. Maka dalam setiap program yang bertujuan menciptakan kehidupan yang layak bagi masyarakat harus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam setiap tahapan dan proses dalam kegiatan tersebut.

Metode Penelitian

Dilihat dari analisis yang digunakan maka penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yang menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai Fakta-Fakta dan Sifat-Sifat Di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara (Sugiono,2008:33). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Talikuran Barat. Kecamatan Kawangkoan Utara ini penulis pilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan penelitian awal Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki masyarakat yang mempunyai semangat gotong royong yang baik. Fokus utama penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Menurut Adi (2010:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap Assesment
2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan
3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan
4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purposive sampling. Purpose sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,2007:157). Berdasarkan penjelasan di atas, maka

yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lurah Talikuran Barat
2. 3 LPM Kelurahan
3. 3 Tokoh masyarakat
4. 2 Tokoh Agama
5. 4 Masyarakat Kelurahan Talikuran Barat

Hasil Penelitian

Berbicara bentuk dan jenis partisipasi, tentunya ada kesamaan dan perbedaannya. Tetapi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan saling ketergantungan serta pengaruh mempengaruhi antara satu dengan lainnya, karena pada prakteknya bentuk partisipasi yang diwujudkan adalah suatu aktivitas menuju pada sarana apa yang harus diberikan. Sedangkan berbicara tentang jenis partisipasi adalah kita membicarakan bagaimana bentuk partisipasi yang diberikan seseorang maupun oleh kelompok masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam pelaksanaan operasional pembangunan adalah sebagai berikut: Aktivitas pembangunan antara lain seperti pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Dalam pelaksanaannya dapat diketahui bahwa siklus kegiatannya ada yang berlangsung secara terus-menerus/continue, tetapi ada pula yang dikerjakan dalam waktu tertentu. Untuk menciptakan proyek pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan menghindarkan pekerjaan yang asal jadi adalah tergantung pada mentalitas masyarakat itu sendiri terutama kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif dalam memikul beban pembangunan. Dalam hal ini berarti partisipasi berbentuk material yang diperlukan seperti finansial, waktu dan tenaga.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur fisik daerah sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Atau, partisipasi juga harus ada ketika pemerintah daerah membutuhkan sebagian dari hak milik mereka dengan ditukar dengan nilai yang sepadan. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis di samping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi di samping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program-program yang datang dari pemerintah maupun program-program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan fokus yang telah ditentukan peneliti membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Menurut Adi, partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap Assesment

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

Kondisi geografis Kelurahan Talikuran Barat memiliki banyak perkebunan serta iklim yang mendukung dalam hal pertanian, masyarakat Kelurahan Talikuran Barat banyak yang berprofesi sebagai petani

dan swasta, kondisi ini tidak didukung oleh pembangunan infrastruktur jalan yang belum memadai masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan, padahal jalan yang menghubungkan antara Kelurahan dengan perkebunan warga sangat penting mengingat penangkutan hasil-hasil pertanian ke Kelurahan. Rencana pemerintah kelurahan membangun Kantor Kelurahan atas swadaya masyarakat telah diprogramkan hal ini mengingat sekarang ini kantor kelurahan masih menggunakan rumah warga.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi dalam hal ini masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah. Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan didapati hasil sebagai berikut: menurut bapak Jackly Rompas seorang masyarakat Kelurahan Talikuran Barat yang berprofesi sebagai petani: saya sebagai masyarakat Kelurahan Talikuran Barat, sudah melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, apalagi saya sebagai petani sangat menginginkan adanya pembangunan jalan ke kebun dan jalan di tengah kelurahan, drainase yang baik. saya sering berkonsultasi dengan kepala lingkungan bahkan lurah, saya sering menyampaikan keinginan saya, namun baru beberapa waktu lalu proyek ini direalisasikan.

Hal senada juga dikatakan oleh bapak Andres Agow seorang masyarakat jaga II Kelurahan Talikuran Barat, beliau mengatakan: pada dasarnya kami masyarakat, tanpa diberitahu telah mengetahui kebutuhan

yang ada, kami telah mengidentifikasi mengenai masalah-masalah yang ada terutama pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, drainasi serta balai Kelurahan telah lama digaungkan, namun baru belum lama ini direalisasikan, kami tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah Kelurahan, mungkin saja dana yang dibutuhkan belum cukup, karena kami tahu tidak mudah membangun suatu proyek tanpa adanya perencanaan yang matang serta dukungan dana yang cukup.

Hal lainnya disampaikan oleh Ibu Afni Pesik masyarakat kelurahan Talikuran Barat mengatakan:

Sampai saat ini kebutuhan yang mendesak di kelurahan talikuran barat adalah kantor kelurahan, dimana semenjak pemekaran sekitar 7 tahun lalu pemerintah kelurahan barat belum memiliki kantor kelurahan yang tetap. Hal ini kami rasa perlu mengingat pelayanan public bagi masyarakat sering terganggu, belum lagi fasilitas pendukung yang tidak memadai, terkadang kami harus mencetak sendiri surat-surat atau bahkan harus menunggu lebih lama Karena surat yang dibuat harus diketik dan dicetak diluar. Hal ini sudah sering kami sampaikan pada saat rapat musrenbang, kepada lurah, kepala lingkungan bahkan kami telah membicarakannya dengan camat, namun hasilnya kami disuruh bersabar karena tidak tersedianya dana.

Pernyataan kedua informan masyarakat tersebut dikuatkan oleh pernyataan lurah kelurahan talikuran barat, beliau mengatakan :

Persoalan sekarang yang ada di kelurahan talikuran barat adalah kantor yang permanen atau tetap, sejak pemekaran belum ada alokasi dana untuk pembangunan kantor, hal ini terjadi bukan hanya di kelurahan talikuran barat saja, namun juga terjadi

hampir disetiap kelurahan pemekaran, bahkan kantor camatpun masih berstatus rumah warga. Hal ini telah disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Selain itu permasalahan yang ada adalah masih rusaknya beberapa jalan yang ada di kelurahan terutama di kompleks sekolah SD dan kompleks waruga serta beberapa akses jalan ke kebun warga belum memadai, hal ini menjadi pergumulan pemerintah dan masyarakat karena kami adalah kelurahan bukan desa jadi tidak mempunyai alokasi dana sendiri, oleh sebab itu apabila ingin membangun sesuatu harus mengandalkan swadaya masyarakat. Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melihat permasalahan yang sedang terjadi dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut.

2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan

Tahap ini Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara, pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah Kelurahan melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua,

seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Kaligis Tokoh masyarakat Kelurahan Talikuran Barat: “proses pengidentifikasian alternative program, digali dari setiap lingkungan, apakah di satu lingkungan itu dilakukan hanya sekali atautkah lebih dari sekali dengan titik lokasi yang berbeda, pemerintah sering berkunjung ke lingkungan-lingkungan ataupun memanggil kepala lingkungan untuk menanyakan perihal permasalahan yang dihadapi serta program pembangunan seperti perbaikan jalan dan pembangunan balai lingkungan”

Demikian juga yang dikemukakan oleh Max Mapasa salah seorang masyarakat Talikuran Barat: “penggalian gagasan atau rancangan program dilaksanakan mulai tingkat Lingkungan hingga tingkat Kelurahan, masyarakat turut terlibat dalam hal tersebut, hanya saja masyarakat sering tidak tertarik karena banyaknya kesibukan yang dilakukan seperti pekerjaan, pelayanan gereja, jadi tidak banyak masyarakat yang terlibat dalam proses perumusan program”

Ditambahkan lagi bahwa: Informasi tersebut menunjukkan bahwa proyek yang dilaksanakan benar merupakan proyek yang idenya digali dari masyarakat Talikuran Barat dan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari proses penggalian gagasan tersebut, maka lahirlah beberapa usulan yang akan mewakili kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya akan diranking sesuai dengan skala kebutuhan masyarakat dan dimusyawarahkan dalam musyawarah tingkat Kelurahan. Beberapa proyek yang telah dan tengah dilaksanakan adalah proyek pembangunan jalan kekebun, drainase serta pembangunan kantor Kelurahan.

Dalam pelaksanaan proyek secara teknis juga tidak dapat terlepas dari pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di Kelurahan bersangkutan. Hal ini dikecualikan jika sumberdaya yang dimaksudkan tidak terdapat di Kelurahan, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Lingkungan I: “apabila ada program pembangunan semua pekerja proyek adalah orang asli Kelurahan, misalnya bagi yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, silahkan kerjakan yang bagian pemasangan batu, lagian tetap diberi upah kerja. Dan sebagai partisipasi mereka, maka upah yang mereka minta pun tidak seperti jika mereka bekerja biasanya”

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Kelurahan Talikuran Barat: “Untuk masalah pengerjaan yang sifatnya membutuhkan keahlian, maka dicari pula masyarakat di Kelurahan ini yang betul-betul ahli dalam bidang tersebut” Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut memang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, karena tanpa adanya sosialisasi, maka kendati terdapat minat masyarakat dalam berpartisipasi akan tetap menyurutkan hal tersebut. Dengan adanya sosialisasi yang baik, maka informasi yang didapatkan dari sosialisasi akan dapat menjadi pemicu terhadap timbulnya partisipasi. Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa di Talikuran Barat sifat gotong royong masyarakat masih tinggi, hanya saja bagaimana peran dari pemerintah Kelurahan dalam mengarahkannya dan mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat: “Semangat gotong royong di Talikuran Barat ini

masih sangat kental, dan mereka sangat bersemangat apabila mereka dipanggil untuk turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan”

3. Tahap Pelaksanaan(Implementasi) Program atau Kegiatan

Tahap ini Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis turun langsung ke tempat pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Talikuran Barat, yang penulis lihat pembangunan tersebut sementara berjalan seperti pembelian lahan untuk pembangunan kantor desa, jalan ke kebun, Karena jaraknya yang cukup jauh jadi memakan waktu dan dana yang cukup banyak, lain halnya dengan pembangunan drainase, pengerjaan proyek ini telah selesai dan proses pengerjaannya melibatkan masyarakat setempat. Hal ini dikatakan oleh Lurah Talikuran Barat, beliau mengatakan: Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur jalan Kelurahan sementara dilaksanakan, yang mengerjakannya adalah masyarakat sekitar ada beberapa yang memang memberikan partisipasi tenaga ataupun sumbangan uang, masyarakat disini cukup partisipatif dalam hal pembangunan, hanya saja tidak semua yang betul-betul berpartisipasi masih ada saja masyarakat yang memang tidak berpartisipasi, alasannya beragam-ragam dari pekerjaan, kesehatan ataupun karena memang malas. Untuk proyek pembanguna drainase, pembangunan ini memang telah lama selesai proyek ini hasil dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PeKelurahanan (PNPM-MP) dan dampaknya positif, masyarakat juga turut terlibat dalam pengerjaannya karena juga mereka dibayar. Hal senada juga

dikatakan oleh Bapak Johny seorang masyarakat Kelurahan Talikuran Barat beliau mengatakan: dalam tahap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur memang melibatkan masyarakat pada umumnya, tetapi saya melihat ada beberapa masyarakat yang tidak berpartisipasi secara langsung, hal ini saya nilai selain dari masyarakat, pemerintah juga harus pro aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendorong, mengunjungi ataupun memberikan sanksi yang tegas, terlihat pemerintah tidak pernah memberikan peringatan ataupun sanksi social kepada masyarakat yang tidak berperan dalam pembangunan terkadang pemerintah Kelurahan hanya mengandalkan masyarakat yang betul-betul rajin dan berpartisipasi kebanyakan adalah petani.

Dari hasil penelitian diatas, penulis dapat menilai dari aspek sosiologis, masyarakat terkadang berpartisipasi hanya karena ada pendapatan atau upah yang didapat, hal ini terlihat wajar namun juga sekaligus memprihatinkan, disini lain pemerintah dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini masyarakat ikut mengawasi dari laporan kegiatan dari segi program, waktu maupun dana yang digunakan. Di Kelurahan Talikuran Barat peran masyarakat dalam tahap evauasi ini tidak terlalu terlihat hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yakni informan masyarakat salah satunya bapak Tommy Rondonuwu seorang masyarakat Kelurahan Talikuran Barat mengatakan: “Kalau dalam melihat

hasil akhir suatu proyek di Kelurahan ini, saya tidak terlalu memikirkannya, yang terpenting hasil yang dikerjakan sudah selesai dan dapat dinikmati masyarakat, karena walaupun ada penyimpangan masyarakat dapat melihat”.

Hal senada juga di katakana oleh ibu Silva Laloan yang juga masyarakat Kelurahan Talikuran Barat beliau mengatakan: “Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Talikuran Barat ada beberapa yang dari pemerintah pusat seperti pembangunan drainase, walaupun mengalami kendala keuangan, waktu pelaksanaan kami memakluminya yang terpenting hasil akhirnya bisa dinikmati selebihnya tinggal pertanggungjawaban mereka dengan Negara. Begitu juga dengan pembangunan jalan ke kebun dan Kantor Kelurahan, masyarakat dapat menilai hal tersebut karena yang mengelola juga adalah masyarakat Kelurahan”. Dari hasil wawancara kepada informan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan evaluasi kerja, masyarakat Kelurahan Talikuran Barat tidak terlalu peduli yang terpenting adalah hasil akhir dari pekerjaan, hal ini tentu tidak terlalu baik mengingat peran masyarakat dalam tahap evaluasi suatu pembangunan sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pelaksanaan suatu program.

Kesimpulan

1. Pada tahap assessment atau dalam pengidentifikasian masalah dilapangan, terlihat Partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan

kepada pihak pemerintah akan hal tersebut.

2. Dalam tahap Alternative Program atau Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara, yakni pembangunan infrastruktur tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah Kelurahan melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua
3. Dalam tahap implementasi pembangunan infrastruktur, masyarakat terkadang berpartisipasi hanya karena ada pendapatan atau upah yang didapat, hal ini terlihat wajar namun juga sekaligus memprihatinkan, disisi lain pemerintah dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Tingkat pengawasan atau evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah, masih banyak masyarakat yang bermasa bodoh atau tidak ingin mengetahui laporan dari pemerintah, mereka hanya tahu adalah hasil dari pembangunan itu sendiri.

Saran

1. Disarankan kepada pihak pemerintah agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan yang sedang dan telah dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih banyak memberikan masukan kepada pemerintah.
2. Sebaiknya pembangunan infrastruktur di Kelurahan Talikuran Barat, terfokus dahulu kepada satu

proyek pengerjaan agar supaya masyarakat lebih focus terlibat kepada satu proyek pembangunan, karena apabila beberapa proyek dijalankan sekaligus akan menimbulkan kebingungan.

3. Pemerintah harus mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan karena masyarakat terkadang banyak yang bekerja, ataupun kalau mereka ikut melaksanakan pembangunan harus ada bayaran.
4. Pemerintah harus proaktif dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar masyarakat dapat lebih berperan dalam mengawasi dan bersama-sama mengevaluasi setiap kegiatan, agar mengurangi tingkat kesalahan dalam suatu pengerjaan proyek pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2007. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Adi, Isbandia Rukminto. 2010. *Pemberdayaa, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soetrisno. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. 2007. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFPE.
- Conyers, Diana. 2011. "An Introduction to Social Planning in The Third World". By Jhon Wiley & Sons Ltd. 1994. Terjemahan
- Djuretnaa Imam Muhni. 2005. *Moral dan Religi*. Yogyakarta: Kanisius
- Danim, Korten, 2008. *Pembangunan desa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2007. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: CIDEAS.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Khairuddin. 2008. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mantra Bagus Ida. 2006. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Talizuduhu. 2008. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Oakley A. 2010, *Analisa Kebijakan Dar' Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Malang: Bumi Aksara.
- Sastropoetro, Santoso R.A. 2008. *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Soleman B. Taneko. 2006. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan*. Jakarta: RaJawali.
- Supriatna, Tjahya. 2010. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 2 No. 2 Tahun 2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Sugiono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2010. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press.

Tjokromidjojo, Bintoro. 2006. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Todaro, Michael P. 2010. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga

Winardi Nugroho. 2009. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan. Jakarta: Elekx Media Komputindo.